

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha negara dan masyarakat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari sebelumnya merupakan pengertian dari pembangunan nasional (Yorisca, 2020). Pemerintah memiliki kewajiban untuk membimbing, mengarahkan dan melindungi masyarakat serta memelihara situasi dan kondisi agar mendukung pertumbuhan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang diberikan agar masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dapat dicapai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 mengenai Pelayanan Publik, pemerintah dituntut guna melakukan pemenuhan kepentingan dasar setiap masyarakat, termasuk ketersediaan layanan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar dan hak sipil setiap masyarakat akan barang dan jasa publik serta pelayanan administrasi. Pelayanan publik sendiri diartikan sebagai penghubung langsung antara negara dengan masyarakat. Sehingga dapat diartikan juga sebagai serangkaian kegiatan pelayanan yang ditawarkan oleh penyelenggara layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan setiap warga seturut dengan peraturan yang berlaku (Marsono dkk., 2017).

Karena pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban dalam memberikan layanan pada masyarakatnya, peningkatan kualitas layanan publik menjadi sangat fundamental untuk dijaga tidak hanya sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional

sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Prabowo dkk., 2022). Upaya pemerintah dalam pemberian kesejahteraan dan keadilan yang merata kepada segenap masyarakat Indonesia didasarkan pada konstitusi dengan mengamanatkan bahwa negara menyediakan layanan guna pemenuhan kebutuhan dan hak dasar setiap warga negara.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pemerintah harus merespon dengan cepat dan efisien guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk memajukan sektor pelayanan publik, diperlukan tindakan inovatif untuk membawa perubahan dan kemajuan dalam pelayanan publik. Di era globalisasi, kapasitas untuk berinovasi sangat penting bagi layanan pemerintah, terutama dalam hal pengembangan layanan yang lebih prima untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menemukan penyelesaian atas problema dengan menggunakan sumber daya teknologi yang tersedia (Argenti, 2023).

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dalam upaya membangkitkan kualitas pelayanan publik perluasan *e-government* ditujukan untuk mengembangkan keterbukaan sistem layanan dengan memastikan sistem pengelolaan dokumen dan pemrosesan informasi elektronik selaras. Tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah terkait dengan perluasan *e-government* memungkinkan birokrat untuk bertindak dalam menerapkan pembangunan *e-government* di seluruh negeri (Suciati dkk., 2022).

Penerbitan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ialah sebuah tindakan pemerintah dalam mengembangkan *e-government* yang bertujuan untuk pembangunan tata cara pemerintahan berbasis elektronik yang akan menawarkan *framework* untuk aktualisasi, harmonisasi, pembinaan dan penanganan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara keseluruhan (Katharina, 2020). Adapun dua kegiatan utama dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah pertama sebagai penanganan data, pengelolaan sistem informasi dan prosedur operasional elektronik dan kedua sebagai pengembangan teknologi informasi untuk memudahkan pengaksesan layanan publik melalui internet (Suciati dkk., 2022).

Selain mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju melalui penggunaan elektronik, penerapan *e-government* tentunya memiliki banyak manfaat. Sistem pemerintahan elektronik dapat mempermudah proses pelayanan publik salah satunya dengan penggunaan *website* (Maulani, 2020). Penggunaan website oleh badan publik menjadi esensial dalam peningkatan keterbukaan, peningkatan daya tanggap dan peningkatan keterlibatan masyarakat karena akan memberikan penjelasan dengan lebih efisien kepada masyarakat juga organisasi mengenai proses, struktur dan produk pemerintah serta sebagai wadah berinteraksi satu sama lain (Charoline, 2018).

Di sisi lain, angkatan kerja merupakan komponen lapisan masyarakat ialah sumber daya yang vital dalam mewujudkan pembangunan nasional. Angkatan kerja tidak hanya menyediakan tenaga kerja fisik untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga membawa keterampilan, pengetahuan dan inovasi yang diperlukan

untuk meningkatkan produktivitas. Angkatan kerja yang berkualitas tinggi dapat menciptakan efisiensi produksi yang nantinya akan meningkatkan kualitas produk dan inovasi teknologi.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia juga meningkatkan potensi angkatan kerja secara signifikan. Demografi penduduk yang dinamis memberikan keuntungan dalam hal jumlah talenta yang dapat dimasukkan ke dalam angkatan kerja. Evidensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2021-2023 menunjukkan bahwa terdapat 140 juta jiwa dalam angkatan kerja Indonesia, dimana angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,56 juta orang atau 5,39% (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun terjadi pertumbuhan yang signifikan, kenaikan jumlah angkatan kerja sering kali menjadi tantangan yang kompleks bagi pemerintah terutama dalam konteks pengangguran dan ketenagakerjaan (Yunianto, 2021).

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolis yang sangat besar di Indonesia memegang peranan penting dalam berbagai sektor seperti perekonomian, pemerintahan, politik, perdagangan, pendidikan dan industri. Pertumbuhan penduduk yang signifikan di kota ini membawa dampak terhadap dinamika ketenagakerjaan. Peningkatan populasi ini dapat memengaruhi struktur pasar tenaga kerja, menciptakan tuntutan baru akan lapangan pekerjaan dan mendorong kebutuhan akan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif (Rohani, 2021). Hal ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa masyarakat usia kerja yaitu masyarakat dengan usia 15 tahun ke atas, mengalami tren peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya. Berikut ini adalah tabel status keadaan ketenagakerjaan periode Agustus 2020-2023 di Kota Surabaya.

**Tabel 1.1 Status Keadaan Ketenagakerjaan Periode Agustus
2020-2023 di Kota Surabaya**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
Penduduk Usia Kerja	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.283.993
Angkatan Kerja	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714
- Bekerja	1.427.668	1.420.615	1.518.038	1.463.594
- Pengangguran	154.8996	152.273	125,276	106.120
Bukan Angkatan Kerja	743.185	764.341	704.744	714.279

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (surabayakota.beta.bps.go.id, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 2.283.993 jiwa yang mengalami penurunan jika dibandingkan Agustus 2022 yakni sebanyak 2.348.058 jiwa. Jika dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk usia kerja pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 53.236 jiwa dan turun sebanyak 41.756 jiwa dibandingkan dengan Agustus 2020. Selain itu, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 1.463.594 jiwa penduduk yang bekerja dan 106.120 jiwa pengangguran (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023).

Seiring bertambahnya angkatan kerja, kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup serta kemampuan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan menjadi sebuah prioritas yang memerlukan strategi yang matang. Sebagai pelayan publik, pemerintah Kota Surabaya harus menyediakan inovasi layanan yang mampu memenuhi kebutuhan warganya sesuai dengan peraturan daerah (Aryani dkk., 2021). Inovasi sendiri didefinisikan sebagai gagasan baru bernilai inovatif ketika dikembangkan juga diterapkan sehingga memiliki manfaat bagi seseorang kelompok atau organisasi. Inovasi pasti memerlukan pengetahuan,

teknik, barang, penemuan, dan teknologi baru yang dapat dikembangkan dan diterapkan di bidang tertentu (Prabowo dkk., 2022).

Inovasi dalam bidang pelayanan publik dapat membuka pintu menuju perbaikan sistem administrasi, pengembangan teknologi informasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah merilis beberapa inovasi dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakatnya yang kemudian ditetapkan selaku kota terinventif pada Penganugerahan *Innovative Government Award* (IGA) yang dilaksanakan Kementerian di 2021. Setelah penobatan tersebut, Kota Surabaya kemudian meluncurkan bermacam aplikasi dengan berpedoman pada SK Walikota Nomor 427 Tahun 2021 mengenai Penetapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal akan membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel serta meningkatkan partisipasi publik. Pemanfaatan teknologi digital melalui internet dalam mempercepat perluasan akses masyarakat akan sumber informasi menjadi salah satu kekuatan penggerak penyelenggara pemerintah. Selain itu kemudahan dalam mengakses informasi pekerjaan dengan menggunakan situs web akan sangat membantu pencari kerja untuk lebih cepat dalam mendapatkan pekerjaan yang setimpal dengan kemampuannya sehingga semakin banyak juga angkatan kerja yang akan terserap (Anfasa, 2021). Pemerintah selalu berambisi melangsungkan digitalisasi yang adil, berkemampuan dan berkepanjangan karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat adalah hak

yang harus dihormati. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada artikel *press release* No. 516/HM/KOMINFO/11/2023.

Kominfo.go.id - ... Tidak hanya berbicara tentang pembangunan dan akses terhadap infrastruktur digital, namun juga pemenuhan hak masyarakat atas akses terhadap informasi itu sendiri. Sehingga agenda transformasi digital juga harus didukung oleh fasilitas layanan dan teknologi penyampaian informasi publik yang memadai bahkan inovatif.

Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/53277/siaran-pers-no-516hmkominfo112023-tentang-menteri-budi-arie-perluas-akses-informasi-publik-dengan-teknologi-digital/0/siaran_pers diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

Melalui artikel di atas dapat diketahui bahwa akses terhadap informasi publik termasuk informasi lowongan pekerjaan merupakan hak mendasar bagi masyarakat. Upaya pemerintah dalam pemberian kesejahteraan dan keadilan yang merata kepada segenap masyarakat Indonesia yang didasarkan pada konstitusi dengan mengamanatkan bahwa negara menyediakan layanan guna pemenuhan kebutuhan dan hak dasar setiap warga negara harus didukung dengan tindakan inovatif untuk membawa perubahan dan kemajuan dalam pelayanan publik.

Namun, ketersediaan informasi pasar kerja yang belum optimal merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penyerapan angkatan kerja. Adapun faktor penghambat dalam permasalahan ini adalah kurangnya keefektifan sistem, mekanisme, serta sarana dan prasarana informasi yang diberikan pada pencari kerja maupun perusahaan (Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Disperinaker). Untuk itu, dibutuhkan komitmen oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui pelayanan publik, terutama untuk membangun domain yang mendukung dan

mendorong rakyat agar mendapat pekerjaan yang tepat, membantu menyediakan pekerjaan bagi pekerja. Hal ini juga sesuai dengan artikel berita tribunjatim.com.

tribunjatim.com - ... Seluruh angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan akan masuk *database*, kemudian Pemerintah Kota Surabaya akan membuat sistem untuk mengintervensi mereka. Tidak hanya *by name by address*, tapi juga profil utuh termasuk *skill* khusus hingga *passion* pencari kerja itu tergambar dengan lengkap. Dengan begitu mereka akan dengan mudah disalurkan kepada penyedia tenaga kerja di Kota Surabaya. Tugas Pemkot atau Disnaker yang mengintervensi.

Sumber: <https://jatim.tribunnews.com/2023/11/01/surabaya-perlu-digitalisasi-penyerapan-tenaga-kerja-reni-astuti-pencari-kerja-tak-susah-melamar> diakses pada 28 Maret 2024.

Berdasarkan berita tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah berkomitmen untuk mengoptimalkan penyediaan informasi pasar kerja melalui penggunaan *website* dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik.

Sehubungan dengan penerapan digitalisasi, Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah dimungkinkan untuk terus berinovasi dengan meluncurkan berbagai aplikasi pelayanan publik melalui Perda No. 4 Tahun 2021 mengenai RPJM Kota Surabaya tahun 2021-2026. Hal ini memenuhi misi pemerintah untuk menciptakan transformasi birokrasi yang berbasis digital, bersih, dinamis dan tangkas. Hal sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti yang menuntut penggunaan sistem digital dalam penyerapan SDM diartikel berita tribunjatim.com.

tribunjatim.com - ... tidak sulit membuat digitalisasi penyerapan tenaga kerja berbasis data ini. Surabaya sudah membuktikan pada sistem layanan Dispendukcapil hingga Kader Surabaya Hebat. Surabaya baru benar-benar menjadi *smart city* kalau pengentasan pengangguran juga dengan digitalisasi.

Sumber: <https://jatim.tribunnews.com/2023/11/01/surabaya-perlu-digitalisasi-penyerapan-tenaga-kerja-reni-astuti-pencari-kerja-tak-susah-melamar> diakses pada 28 Maret 2024.

Melalui berita di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan sadar akan pentingnya penerapan digitalisasi di bidang penyerapan tenaga kerja. Penerapan digitalisasi ini akan dapat membantu masyarakat angkatan kerja untuk mengakses informasi sehingga angkatan kerja yang ada akan terserap.

Salah satu institusi pemerintah Kota Surabaya yang bertanggungjawab dalam memberi layanan publik terkait ketenagakerjaan adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker). Disperinaker sendiri mempunyai komitmen dalam memberi layanan berkualitas prima serta melaksanakan urusan pemerintah dan melaksanakan tugas pembantuan di dalam lingkup kewenangan daerah. Dinas ini juga mencakup berbagai aspek terkait ketenagakerjaan. Peran utamanya adalah mengembangkan kebijakan mengenai peluang kerja dan memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja.

Untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional dan mengatasi tantangan dalam perluasan informasi lowongan kerja, Disperinaker Kota Surabaya mencanangkan Lompatan Besar Pembangunan Ketenagakerjaan melalui *link and match* ketenagakerjaan guna membangun proses konsolidasi, pelatihan, lisensi dan penugasan pekerja yang berpengaruh dan berdaya guna untuk menyesuaikan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja menggunakan aplikasi *Arek Suroboyo Siap Kerjo* (ASSiK). Inovasi ASSiK dikembangkan berdasarkan Perwali Surabaya Nomor 76 Tahun 2021 yang menetapkan konstruksi, struktur institusi, uraian

tupoksi Disperinaker Kota Surabaya. Menurut Peraturan ini, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ditugaskan untuk melakukan aktivitas antar kerja dan menyebarkan informasi pasar kerja. Berikut adalah tampilan ASSiK yang diakses melalui *website*.



Gambar 1.1 Tampilan ASSiK

Sumber: *disnaker.surabaya.go.id*, 2024

Aplikasi ASSiK memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya akses terhadap informasi lowongan pekerjaan. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi yang memungkinkan penawaran pekerjaan melalui internet. Aplikasi ASSiK, sebagai bagian dari upaya digitalisasi Disperinaker memiliki tujuan utama untuk mewadahi konferensi pekerja dan perusahaan. Hal ini sesuai dengan artikel berita *tribunjatim.com*.

tribunjatim.com - ... para pencari kerja atau angkatan kerja itu kebanyakan adalah anak muda. Mereka dipastikan sangat akrab dunia digital bersama *smartphone* mereka. Mereka harus meng-*entry* profil terkini mereka dalam *platform* yang telah disediakan Pemkot. “Teknisnya bisa apa saja. yang penting *database* pencari kerja ini sudah terpegang oleh sistem. Begitu ada kebutuhan, mereka akan terkonfirmasi secara akurat dan detail. Inilah tugas

Pemkot mengantarkan mereka pada penyedia kerja”, kata Reni Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

Sumber:<https://jatim.tribunnews.com/2023/11/01/surabaya-perlu-digitalisasi-penyerapan-tenaga-kerja-reni-astuti-pencari-kerja-tak-susah-melamar> diakses pada 28 Maret 2024.

Berdasarkan berita tersebut, dapat diketahui bahwa pengimplementasian digitalisasi melalui Aplikasi ASSiK menyebabkan setiap angkatan kerja mempunyai potensi untuk bisa bekerja bergantung pada pencari kerja itu sendiri. Dengan pengimplementasian digitalisasi ini, interaksi antara pencari kerja dan perusahaan akan menjadi lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional.

Keunggulan lain yang diperoleh dari Aplikasi ASSiK ini adalah hanya dengan mengunjungi *website* <https://disnaker.surabaya.go.id/assik>, para pencari kerja dapat dengan mudah melakukan registrasi, memilih jenis pekerjaan yang sesuai, dan berinteraksi secara langsung dengan pemberi kerja. Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses rekrutmen tetapi juga memberikan kemudahan bagi pencari kerja dengan mengurangi kebutuhan membawa berbagai berkas fisik seperti surat lamaran kerja dan dokumen lainnya (Argenti, 2023). Selain itu, dengan melakukan proses registrasi akun maka angkatan kerja dapat terhubung menggunakan sistem sehingga tidak butuh menanti pelaksanaan bursa kerja yang teragendakan.

Aplikasi *Arek Suroboyo Siap Kerjo* (ASSiK) ini dirancang untuk memberikan peluang kerja yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi warga Kota Surabaya yang mencari pekerjaan. Di Kota Surabaya sendiri terdapat lebih dari sepuluh ribu perusahaan yang menawarkan berbagai jenis pekerjaan seperti *Human Resource Development* (HRD), tekstil hingga buruh kasar. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini dalam artikel berita liputan6.com.

liputan6.com - ... semua disiapkan khusus *Arek Suroboyo*. Kita sudah menetapkan Perda No. 1 Tahun 2023 dimana perusahaan di Surabaya sudah dikunci memprioritaskan warga Surabaya, khususnya warga sekitar.

Sumber:<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5273768/catat-ya-warga-jangan-bawa-saudara-tak-punya-ketrampilan-ke-surabaya?page=2> diakses pada 30 Maret 2024.

Melalui berita diatas dapat diketahui bahwa aplikasi ASSiK memprioritaskan masyarakat Kota Surabaya dalam pengaksesan informasi terkait lowongan pekerjaan. Dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi ini memungkinkan pencari kerja menemukan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan minatnya sehingga mengurangi hambatan informasi yang sering kali menjadi tantangan dalam mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan kesempatan kerja yang diberikan menjadi lebih sesuai sehingga berpotensi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pencarian kerja.

Aplikasi ASSiK dihadirkan dalam rangka penerapan pelayanan berbasis *e-government* untuk mewujudkan kemudahan akses terhadap informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Surabaya. Aplikasi ASSiK sendiri mempunyai fitur utama yaitu lowongan pekerjaan dan profil perusahaan. Fitur lowongan kerja ini menampilkan berbagai lowongan pekerjaan di Kota Surabaya. Pekerjaan tersebut berasal dari berbagai perusahaan dan industri baik swasta maupun pemerintah. Adapun jumlah lowongan kerja yang tersedia dalam bursa kerja ASSiK adalah sebanyak 578 lowongan pekerjaan. Fitur profil perusahaan merupakan fungsi yang menampilkan informasi tentang perusahaan

yang telah memposting pekerjaan dimana informasi yang ditampilkan meliputi area bisnis, alamat, nomor telepon dan email perusahaan. Adapun jumlah perusahaan yang telah menawarkan lapangan pekerjaan melalui bursa kerja ASSiK adalah banyak 356 perusahaan (Disperinaker Kota Surabaya, 2023).

Kemudahan akses terhadap informasi ketenagakerjaan terkini merupakan aspek penting dalam program ASSiK. Hal ini memungkinkan pencari kerja untuk mengikuti perubahan di pasar kerja, mempelajari peluang yang tersedia dan beradaptasi dengan perubahan dalam persyaratan pekerjaan. Selain itu, aplikasi ini dapat membantu pemerintah mengumpulkan data yang diperlukan untuk memahami tren pengangguran dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui upaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan perekonomian yang lebih kuat, ekonomis dan berkelanjutan. Program inovatif seperti ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menemukan solusi kreatif terhadap masalah sosial yang serius seperti pengangguran.

Inovasi wajib memiliki nilai yang lebih baru dari inovasi sebelumnya, sehingga pasti terdapat kerumitan yang mengharuskan pengguna untuk beradaptasi, tidak terkecuali Aplikasi ASSiK. Sebagai inovasi yang tergolong baru, Aplikasi ASSiK belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat di Kota Surabaya. Hal ini mengakibatkan sebagian pencari kerja tidak menggunakan aplikasi ASSiK ini untuk mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan sehingga masih diperlukan sosialisasi terkait aplikasi ini. Selain itu, sistem teknologi informasi

yang digunakan dalam Aplikasi ASSiK belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam program tersebut masih menghadapi tantangan. Sebelum resmi diluncurkan pada Juni 2022, Aplikasi ASSiK sendiri telah diujicobakan selama dua tahun yaitu di tahun 2020 dan 2021. Dengan adanya Aplikasi ASSiK ini akan membantu masyarakat Kota Surabaya untuk mendapatkan informasi lowongan kerja bahkan pekerjaan.

Berdasarkan data yang diuraikan dapat diketahui bahwa akses terhadap informasi lowongan pekerjaan memiliki peranan penting dalam penyerapan angkatan kerja, maka Aplikasi ASSiK ini merupakan aplikasi yang inovatif dalam rangka penerapan *e-government* di bidang pelayanan publik khususnya bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana Aplikasi ASSiK telah dilakukan. Dalam menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan teori model inovasi menurut Rippetoe & Rogers dalam Prabowo dkk., (2022:42-43) yang mempunyai lima karakteristik inovasi sebagai variabel penelitian yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas dan observabilitas. Penggunaan teori ini didukung dengan kesesuaian pendefinisian inovasi menurut Prabowo dkk., (2022:21) yang menyatakan bahwa suatu inovasi disebut sebagai inovasi jika mempunyai *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk meneliti tentang aplikasi ini lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Karakteristik Inovasi *Arek Suroboyo Siap Kerja* (ASSiK) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah didalam penelitian ini adalah “bagaimanakah karakteristik inovasi Aplikasi *Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSiK)* di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam membantu mengurangi tingkat pengangguran?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Aplikasi *Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSiK)* di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memenuhi karakteristik inovasi sesuai dengan teori Rippetoe & Rogers serta dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memperluas wawasan terkait aplikasi *Arek Surabaya Siap Kerjo (ASSiK)* di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi (*literature*) pada perpustakaan yang digunakan sebagai kajian untuk pengembangan penelitian yang akan datang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

3. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Penelitian terkait Aplikasi *Arek Suroboyo Siap Kerjo* (ASSiK) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terutama sebagai masukan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan guna mengoptimalkan akses masyarakat Kota Surabaya akan informasi lowongan kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Kota Surabaya.